

Submitted: 02-04-2023 | Accepted: 13-04-2023 | Published: 07-05-2023

Implementasi Model Kurikulum Dan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung

Meti Oktapia¹, Roaini², An An Andari³, Agus Sujarwo⁴, Nur Hidayah⁵

1,2,3,4,5 Universitas Islam An Nur Lampung

E-mail: 1-meti.oktapia.56697@gamail.com, 2-roainiazzam@gmail.com, 3-andari@annur.ac.id, 4-agussujarwo@annur.ac.id, 5-nurhidayah@annur.ac.id

Abstract

This study aims to find out about the implementation of curriculum management in improving the quality or quality of learning starting from the curriculum planning process, curriculum organization, curriculum implementation, curriculum supervision, and curriculum evaluation. The educational institution studied was Darul Hidayah Islamic Junior High School, Bandar Lampung. This study uses a naturalistic qualitative research method, namely collecting data and describing it naturally according to the actual circumstances and conditions of the field. The results of the research show that the implementation of curriculum management is increasing The quality of learning at SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung has been going quite well starting with the curriculum planning process and continuing with organizing, implementing, supervising and evaluating. Through planning, the head of the Batang Quiz Entrepreneurial Middle School together with the Curriculum Development Team compiled a curriculum program starting from the semester program, annual program, syllabus, Learning Implementation Plan, learning materials and learning media needed for one school year. While in organizing, the school prepares a curriculum that is relevant to national education goals and adapted to regional needs. These programs were then introduced and implemented by the teachers and students properly. In order for these programs to be implemented properly, monitoring and evaluation are carried out

Keywords: Curriculum Management, Learning Quality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi manajemen kurikulum dalam meningkatan kualitas atau mutu pembelajaran mulai dari proses perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pengawasan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Lembaga pendidikan yang diteliti adalah Sekolah Menengah Pertama SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naturalistik, yakni melakukan pengambilan data serta dideskrpisikan secara alami sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sesungguhnya dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi manajemen kurikulum dalam meningkatan kualitas pembelajaran di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik yang diawali dengan proses perencanaan kurikulum dan berlanjut dengan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Melalui perencanaan, kepala SMP Wiraswasta Batang Kuis bersama Tim Pengembangan Kurikulum menyusun program kurikulum mulai dari program semester, program tahunan, silabus, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran, bahan pembelajaran serta media pembelajaran yang dibutuhkan selama satu tahun pelajaran. Sementara dalam pengorganisasian, pihak sekolah menyusun kurikulum yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Program-program tersebut selanjutnya diperkenalkan dan dilaksanakan oleh para guru dan siswa dengan baik. Agar program-program tersebut terlaksana dengan baik, maka dilakukan pengawasan dan evaluasi..

Kata Kunci: Manajemen Kurikulum, Kualitas Pembelajaran

A. PENDAHULUAN

Proses pendidikan adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan ketika proses pemberdayaan menunjukkan hasilnya disitulah terlihat kualitas lembaga pendidikan. Penerapan manajemen merupakan faktor penting dalam pencapaian kualitas sekolah yang diharapkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas pendidikan (Warisno, 2019) .

Pendidikan dan pembelajaran adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan karena dari keduanya pendidikan dilaksanakan, dikembangkan dan dijadikan dasar bagi upaya pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan Pembelajaran dipahami sebagai proses penciptaan lingkungan yang menjadikan seorang individu dapat melakukan aktifitas belajar yang dengan belajar itu akan dapat berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak terampil menjadi terampil (Alpian et al., 2019) .

Pendidikan adalah interaksi pribadi diantara para peserta didik dan interaksi antara guru dengan peserta didik. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar adalah proses pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika masing-masing individ berhubungan dengan yang lain serta membangun pengertian dan pengetahuan Bersama (Hasan et al., 2022).

Desentralisasi pendidikan menawarkan paradigma baru bagi kepala sekolah untuk lebih mandiri dalam mengembangkan seluruh potensi dan sumber daya sekolah untuk menjadi sekolah yang handal bahkan unggulan. Tuntutan tersebut diperkirakan berimplikasi dalam penyusunan kurikulum dan manajemen sekolah. Perubahan manajemen pendidikan menjadi suatu keniscayaan, seingga sekolah-sekolah dituntut melakukan perubahan manajemen agar lulusan sekolah benar-benar menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas (Irawan et al., 2022).

Zainal Arifin menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia hingga saat ini terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan berbagai pendekatan, baik melalui pendekatan kelembagaan, legal formal, maupun pemberdayaan sumber daya pendidikan. Pendekatan kelembagaan salah satunya melalui lahirnya Direktorat Jenderal Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendekatan legal formal melalui serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun pendekatan pemberdayaan sumber daya pendidikan diwujudkan dengan cara melakukan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan secara sistematis dan berkesinambungan (Destrianjasari et al., 2022)

Pendidikan di era globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya penyempurnaan sistem pendidikan, misalnya penyempurnaan pada manajemen pendidikan yang modern dan profesional dengan bernuansa pendidikan. Dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan diharapkan mampu mewujudkan peranannya secara efektif dengan keunggulan dalam kepemimpinan, staf, proses belajar mengajar, pengembangan staf, kurikulum, tujuan dan harapan, iklim sekolah, penilaian diri, komunikasi, dan keterlibatan orang tua/masyarakat.

Lahirnya otonomi daerah dalam bidang pendidikan yang secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 telah memberikan peluang yang besar bagi daerah dan lembaga pendidikan dalam mengelola dan menata penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi. Dalam hal ini, menurut Hamzah B Uno, bahwa guna menyesuaikan perubahaan kebijakan tersebut, maka visi pendidikan hendaknya harus segera dibenahi. Pelaksanaan pendidikan yang selama ini banyak diwarnai dengan pendekatan sarwa negara (state driven); yakni yang berorientasi terjadinya sentralisasi pendidikan; harus bisa diorientasikan pada aspirasi masyarakat (putting customers first); yakni melalui sistem desentralisasi pendidikan. Pendidikan harus mengenali siapa pelanggannya, dan dari pengenalan ini pendidikan memahami apa aspirasi dan kebutuhan mereka, baru ditentukan sistem pendidikan, macam kurikulumnya, dan persyaratan pengajarnya (Ismanto et al., 2022).

Adanya sistem desentralisasi pendidikan dianggap sebagai jalan yang terbaik guna menata pendidikan Indonesia di masa mendatang. Sebagai konsekuensi kebijakan ini, maka pelaksanaan konsep school based Manajement (manajemen berbasis sekolah) dan community-based education (pendidikan berbasis masyarakat) merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam era otonomi daerah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai konsepsi dasar manajemen pendidikan masa kini merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan dan kepercayaan yang luas bagi sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah. Adapun fungsi utamanya adalah mencari, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia, serta memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah yang bersangkutan. Sebagian besar sekolah swasta sebenarnya telah melaksanakan konsepsi ini walaupun sebagian dari mereka masih perlu meningkatkan diri dalam upaya mencapai produktivitas sekolah yang diinginkan.

Konsep peningkatan kualitas pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan manajemen berbasis sekolah. Menejemen Berbasis Sekolah

(MBS) akan membawa kemajuan dalam dua area yang saling tergantung, yaitu, pertama, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang tua, siswa dan masyarakat. Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi (Imron & Burhanuddin, 2004).

Model Menegemen Berbasis Sekolah menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang berdampak terhadap kinerja sekolah. Kinerja sekolah akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah yang menyangkut pengembangan kurikulum. Namun demikian, dalam merumuskan kebijakan, sekolah tetap mengacu kepada kebijakan pusat serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat (Ismanto et al., 2022).

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Konsep Manajemen Berbasis Sekolah bahwa Kurikulum merupakan salah satu kewenangan yang didelegasikan kepada sekolah. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh sekolah untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikandengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah (Hamidah et al., 2021).

Pengelolaan kurikulum pada tingkat sekolah perlu dikoordinasi oleh pihak pimpinan lembaga dengan memberdayakan partisipasi para orangtua dan masyarakat. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dengan maksud agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pada pemerintah.

Sekolah Menengah Pertama SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung merupakan lembaga pendidikan yang dikembangkan sesuai konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan penerapan Kurikuum 2013. SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung yang saat ini dipimpin oleh Sahebi terus melakukan pembenahan dan penataan guna memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Pembenahan dan penataan tersebut mencakup penyempurnaan sarana dan prasarana.

SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung sebagai salah satu satuan Pendidikan, melakukan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Kurikulum SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung disusun dengan berlandaskan kepada (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2023 kepada kepala sekolah bahwa kurikulum SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung tahun pelajaran 2022/2023 mengacu pada Kurikulum 2013. Berdasarkan penjelasan di atas, adalah penting permasalahan ini untuk diteliti sedemikian rupa

sehingga nantinya ditemukan formula dan acuan yang baik dalam menata dan mengelola kurikulum, terutama kurikulum untuk tingkat SMP. Selain itu faktor kemudahan akses, komunikasi dan transportasi menuju SMP Wiraswasta karena SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung berada di Kota Bnadar Lampung serta kedekatan secara emosional peneliti kepada SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung sebab peneliti juga mengabdikan diri di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan di sekolah tersebut. Adapun judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Implementasi Model Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran Dalam Meningkatkan kualitas Pembelajaran di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung".

B. PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu: jenispenelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui perhitungan statistic atau menggunakan ukuran angka, melainkan diperoleh melalui kata-kata tertulis atau lisan narasumber dan berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian dengan kata dan kalimat tersebut untuk memperoleh kesimpulan dari suatu penelitian (Ismaya, 2019).

Obyek adalah suatu benda yang dilibatkan dalam suatu aktivitas. Subyek adalah seseorang yang melakukan suatu aktivitas. Adapun obyek penelitian ini adalah "Implementasi Model Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran." Sedangkan subyek penelitiannya adalah Kepala Sekolah, Guru z Staf Dan Siswa SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan observasi / pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Untuk menghindari rincian yang tidak penting dengan tujuan memudahkan dalam menganalisis data yang diperoleh dari pengamatan, selain itu untuk menghindari rincian yang tidak penting dan meminimalisir dari kesulitan analisis data, sehingga focus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan, maka penulis menggunakan pengamatan terstruktur.

Pengamatan Terstruktur, yaitu menggunakan pedoman tujuan pengamatan. Adanya pedoman tersebut akan membatasi pokok masalah yang diamati, yakni hanya kegiatan-kegiatan, kejadian, atau tingkah laku yang relevan dengan masalah saja yang di catat.

Tidak terstruktur yaitu Pengamatan tidak terstruktur adalah fleksibel dan terbuka. Situasi terbuka adalah pengamat melihat kejadian secara langsung pada tujuan. Walaupun tidak ada pedoman tujuan pengamatan yang digunakan dalam pengamatan, namun dianggap peneliti telah merencanakan apa yang akan dilihat pada keadaan, tingkah laku atau kejadian.

Wawancara: terstruktur,: Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi siapa yang akan diperoleh. Semi terstruktur/bebas,: Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dan tidak terstruktur: Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dokumentasi: mencari data mengenai variabel yang berupa buku kegiatan panti asuhan, arsip dokumentasi panti, notulen rapat serta dokumentasi lainnya.

Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode Miles dan Huberman: Tahap dalam analisis data adalah reduksi data yaitu proses pemilihan pemisahan data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis, tahap selanjutnya display data yaitu menyajikan data kumpulan informasi, dan tahap terakhir adalah proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penyajian Data: mengumpulkan semua data. Reduksi Data: Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Penarikan Kesimpulan: menarik kesimpulan dari data-data yang telah di dapat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Model Manajemen Kurikulum Dan Pe,belajaran

Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua suku kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Manajemen sendiri diartikan oleh para pakar secara beragam. Hasibuan mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dam efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hamidah et al., 2021).

Adapun Fachruddin mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan organisasi dan untuk menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas (Alawiyah, 2013). Syafaruddin menyimpulkan bahwa manajemen berisikan adanya organisasi sebagai wadah formal, adanya manajer yang melakukan aktivitas manajemen, adanya anggota organisasi bisnis atau perusahaan dan organisasi jasa lainnya, serta fungsi-fungsi dan prosedur yang harus dijalankan sebagai ilmu yang bersumber dari pengalaman empiris selama ini dalam mengelola berbagai organisasi sehingga mencapai kemudahan dalam kehidupan yang serba kompleks untuk memenuhi kebutuhan hidup (Mulyono, 2020) .

Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni dalam melakukan kerjasama dalam suatu organisasi melalui proses yang sistematis, terkoordinasi. Sama halnya seperti manajemen, maka kurikulum juga diartikan oleh pakar pendidikan secara beragam meskipun memiliki tujuan yang sama. Rusman, misalnya, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sriwidadi, 2001).

Kurikulum adalah suatu badan pengetahuan – materi dan /atau subjek pengetahuan itu sendiri. Pendidik dalam pengertian ini adalah proses dimana pengetahuan tersebut ditularkan atau 'disampaikan' kepada siswa dengan metode yang paling efektif yang dapat dibuat atau dirancang. Rusman mendefinisikan manajemen kurikulum sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang

kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistemtik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan K13.11

dari pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada (Hoddin, 2020).

Kurikulum Pada Tingkat Satuan Pendikan dikemas sedemikian rupa hingga kurikulum itu menjadi tepat dan efisien dapat menampung aspirasi kebutuhan wilayah keberadaan sekolah itu dan lingkungan masyarakat sekitar merasa terpenuhi dengan keberadaan sekolah sebagai tempat pendidikan yang tepat juga tidak bertentangan dengan stadart nasional.

2. Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum

Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, sedikitnya ada 5 (lima) prinsip13 yang harus menjadi perhatian penting, yaitu:

- a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- b. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
- e. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan kebijakan pemerintah, seperti kurikulum nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, kebijaksanaan penerapan Kurikulum pada Tingkat Satuan Pendidikan, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang bersangkutan .

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efesien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum.

Sehingga tak heran bila kurikulum ini memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut:(Anita et al., 2022)

- a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum; pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- b. Meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal; kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak

hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integratis dalam mencapai tujuan kurikulum.

- c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik; kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- d. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran; dengan pengelolaan kurikulum yang professional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantai dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara disain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efesien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum; kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

3. Implementasi Manajemen Kurikulum

Salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah kemandirian setiap satuan pendidikan, termasuk dalam implementasi serta pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, pemerintah hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, sedangkan dalam pengembangannya diserahkan kepada masingmasing satuan pendidikan. Secara terperinci Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 Ayat (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.

Guna memenuhi amanat Undang-Undang tersebut, secara garis besar beberapa kegiatan berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum perlu dirumuskan oleh satuan pendidikan, khususnya terhadap langkah-langkah pelaksanaan dan implementasi kurikulum tersebut. Di antara langkah-langkah pelaksanaan serta implementasi kurikulum yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan/sekolah adalah melalui empat tahap, yaitu a. Perencanaan, b. Pengorganisasian, c. implementasi dan d. evaluasi (Hasan & Anita, 2022).

a. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan.

Secara umum, dalam perencanaan kurikulum harus dipertimbangkan kebutuhan masyarakat, karakteristik pembelajar, dan lingkup pengetahuan menurut hierarki keilmuan. Siswa dengan karakteristik tersebut memiliki dua kemungkinan; meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau terjun ke dunia kerja serta masyarakat.

b. Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Pengorganisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian kurikulum, di antaranya:

- 1) Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat (yang mencakup nilai budaya dan sosial) dengan aspek siswa (yang mencakup minat, bakat dan kebutuhan). Dan dalam hal ini, bukan hanya materi pelajaran yang harus diperhatikan, tetapi bagaimana urutan bahan tersebut dapat disajikan secara sistematis dalam kurikulum.
- 2) Kontinuitas kurikulum, dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, agar jangan samapi terjadi pengulangan ataupun loncatloncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya.
- 3) Keseimbangan bahan pelajaran, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan pelajaran dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terus terjadi. Oleh sebab itu dalam pengorganisasian kurikulum keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntutan masyarakat, maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam penentuan bahan pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, religius, seniaspirasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum.
- 4) Alokasi waktu, dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutukan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Maka untuk itu, penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum menetapkan bahan pelajaran.

c. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri. Maka dalam hal ini, pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan dan menguji validasi kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata (Miana Solehah et al., 2023).

d. Evaluasi Kurikulum

Yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum ialah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/data untuk menentukan sejauh aman siswa telah mencapai tujuan pembelajaran.21 Evaluasi kurikulum tersebut dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (feasibility) program. Dalam konteks pelaksanaan serta pengembangan kurikulum, evalusai merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan, karena dengan evaluasi akan dapat ditentukan nilai dan arti dari suatu kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu diperhatankan atau tidak

D. PENUTUP

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya yang seluruhnya telah membahas berbagai permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perencanaan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan yang berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan dalam menjalankan proses pembelajaran. Adapun perencanaan kurikulum yang dilaksanakan tersebut mencakup beberapa kegiatan, yakni meliputi: (1) penyusunan kalender akademik; (2) pengaturan tugas dan kewajiban guru; (3) penyusunan jadwal pelajaran; (4) penyusunan tujuan dan isi kurikulum; dan (5) penyusunan program kegiatan sekolah.
- 2. Pengorganisasian kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung cenderung menggunakan pengorganisasian yang bersifat elektik, yakni suatu program kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Artinya dalam melaksanakan kurikulum, SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung senantiasa menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, perbedaan perkembangan dan kecepatan masingmasing individu siswa sehingga dengan demikian diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan serta potensi masing-masing siswa.
- 3. Pelaksanaan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung dapat dikatakan telah sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terlihat dari terciptanya program belajar-mengajar yang kondusif dan efisien dengan selalu berorientasi pada kebutuhan siswa.
- 4. Dalam melaksanakan program pembelajaran, guru-guru SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung selalu pemperhatikan 3 aspek penting dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, yaitu: pengelolaan KBM; pemilihan strategi pembelajaran; dan penentuan media dan sumber belajar. Ketiga aspek tersebut merupakan penentu keberhasilan pelaksanaan kurikulum sekolah sehingga dapat berimplikasi kepada mutu pendidikan yang sedang dilaksanakan yang tercermin pada hasil perkembangan peserta didik yang memuaskan dari waktu ke waktu.
- 5. Pengawasan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung dilaksanakan dengan dua cara, yaitu mengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Yayasan, kepala sekolah Bersama Pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Melalui pengawasan tersebut kepala sekolah dan pengawas pendidikan langsung mendatangi ruangan kelas dan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksaan pembelajaran. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh kepala

- sekolah pada waktu-waktu tertentu terhadap proses pembelajaran tanpa diketahui oleh para guru dan siswa. Sistem pengawasan yang berlaku di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem pengawasan yang sangat sederhana dan kurang efektif. Sebab pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan biasanya bersifat musiman, sementara aktivitas pengawasan hendaknya dilakukan secara terus menerus. Begitu juga halnya dengan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh kepala sekolah secara diamdiam dinilai kurang efektif. Hal ini bisa berdampak buruk bagi pelaksanaan pengawasan tersebut, bahkan terkesan tidak objektif.
- 6. Evaluasi kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran di SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung berfungsi untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuantujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang sedang dilaksanakan. Selain itu evaluasi kurikulum juga dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Adapun Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, serta kelayakan program. Sedangkan komponen kurikulum yang terpenting untuk dievaluasi pada SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, SMP Islam Darul Hidayah Bandar Lampung menetapkan 4 (empat) aspek utama yang terdiri dari: evaluasi terhadap tujuan pendidikan; evaluasi terhadap materi kurikulum; evaluasi terhadap strategi pembelajaran; dan evaluasi terhadap program penilaian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, F. (2013). PERAN GURU DALAM KURIKULUM 2013. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 4(1), 65–74. https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V4I1.480
- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI MANUSIA. *JURNAL BUANA PENGABDIAN*, 1(1), 66–72. https://doi.org/10.36805/JURNALBUANAPENGABDIAN.V1I1.581
- Anita, A., Putri, A., Harahap, N., & Murtafiah, N. H. (2022). MANAJEMEN KONFLIK DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS ORGANISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *At-Tajdid*: *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 6(2), 135–147. https://doi.org/10.24127/ATT.V6I2.2377
- Destrianjasari, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). PENGERTIAN, TEORI DAN KONSEP, RUANG LINGKUP ISU-ISU KONTEMPORER PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 2442–9511. https://doi.org/10.36312/JIME.V8I2.3304
- Hamidah, A. Z., Warisno, A., & Hidayah, N. (2021). MANAJEMEN KURIKULUM DALAM MENINGKATKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK. *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 7(02), 1–15. http://journal.an-nur.ac.id/index.php/annur/article/view/88
- Hasan, M., & Anita, A. (2022). Implementasi Supervisi Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Kinerja Guru Di MA Al Ishlah Natar Dan MA Mathlaul Anwar Cinta Mulya. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 85–97. https://doi.org/10.24127/ATT.V6I1.2144
- Hasan, M., Warisno, A., Harahap, N., & Hidayati Murtafiah, N. (2022). Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro. *An Naba*, 5(2), 34–54. https://doi.org/10.51614/ANNABA.V5I2.156
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah*

- *Igra'*, 14(1), 15–30. https://doi.org/10.30984/JII.V14I1.1035
- Imron, A., & Burhanuddin. (2004). Perspektif manajemen pendidikan berbasis sekolah. UM Press.
- Irawan, M. N. L., Yasir, A., Anita, A., & Hasan, S. (2022). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kontemporer. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4273–4280. https://doi.org/10.31004/JPDK.V4I6.8887
- Ismanto, H., Murtafi'ah, N. H., & Lestari, S. (2022). IMPLEMENTASI PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMA NEGRI 1 BAKAUHENI LAMPUNG SELATAN. *UNISAN JURNAL*, 1(1), 491–501. http://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/260
- Ismaya, A. (2019). Metodologi Penelitian. Syiah Kuala University Press.
- Miana Solehah, A., Yanti, D., Hasan, M., Islam An Nur Lampung, U., Pesantren No, J., Jati Agung, K., & Lampung Selatan, K. (2023). Implementasi Model Pembelajaran Cooperative Learning Dalam Mewujudkan Pembelajaran Humanistik Pada Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas IX Di Madrsah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin. *Journal on Education*, 5(4), 11166–11173. https://doi.org/10.31004/JOE.V5I4.2041
- Mulyono, A. (2020). Apologia Pendidikan Kaum Miskin. Guepedia.
- Sriwidadi, T. (2001). Manajemen Mutu Terpadu. *The Winners*, 2(2), 107–115. https://doi.org/10.21512/TW.V2I2.3817
- Warisno, A. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Lulusan Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Kabupaten. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 3(02), 99. https://doi.org/10.32332/riayah.v3i02.1322